

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terutama teknologi informasi telah mendorong terjadinya diskursus yang lebih mendalam tentang hakikat dan esensi Pendidikan di kalangan masyarakat. Jika pada episode sebelumnya pendidikan formal seakan menjadi satu-satunya medium untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan rentang usia anak sekolah lazimnya dimulai dari usia 6 tahun dengan diawali mengikuti Pendidikan Sekolah Dasar, namun kini akibat kemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi, tingkat kesejahteraan orang tua lebih baik, dan tantangan dalam kehidupan yang lebih majemuk berimplikasi pada peningkatan pemahaman mereka tentang hakikat pendidikan juga lebih meningkat. Hadirnya globalisasi dengan berbagai kecenderungan yang merasuki pola pikir masyarakat untuk menggapai *big quality* dalam kehidupan, telah menjadi pendulum munculnya paradigma pendidikan modern, dan *education for all*. Fenomena maka semua ini telah mengubah ekspektasi orang tua terhadap Pendidikan, Yudana, (2023). Terkait dengan fenomena tersebut, dalam konteks PAUD, untuk mewujudkan potensi besar ini bisa teraktualisasi dibutuhkan sistem pengelolaan dan tata kelola PAUD yang kuat, yang tidak hanya memastikan ketersediaan layanan, tetapi juga menciptakan lingkungan pembelajaran yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pada sisi lain, gencarnya pemerintah mendesiminasi kepada Masyarakat konsep *the golden age*, juga telah menstimulasi keluarga dan masyarakat bersinergi dengan pemerintah untuk peduli dengan gizi dan nutrisi anak. Sejak dalam kandungan sesuai paradigma *the golden age* asupan nutrisi bagi anak mendapatkan perhatian serius. Memasuki usia balita, sinergi orang tua dan masyarakat dengan pemerintah lebih serius

lagi, karena hampir setiap minggu layanan posyandu hadir di setiap desa dengan tujuan menjamin tumbuh-kembang anak di fase balita. Gebrakan gencar ini dapat disadari karena fase *golden age* adalah fase yang sangat menentukan tingkat ketengguhan anak di masa berikutnya. Tidak hanya berhenti pada sektor nutrisi fisik, pada sektor pendidikan pun sinergi pemerintah dengan masyarakat juga ditingkatkan. Sebagaimana terungkap pada *paragraph* di atas. Jika di masa lalu Pendidikan formal di Sekolah Dasar menjadi kebijakan awal anak diperkenalkan dengan dunia persekolahan yang menyentuh aspek Pendidikan anak, kini di era yang melek Pendidikan, Pendidikan pra sekolah juga merupakan terobosan yang dipilih untuk mendesain agar generasi bangsa ke depan lebih berkualitas. Oleh karena itu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai bentuk Pendidikan prasekolah juga sangat gencar digalakkan. Sesuai penelitian pendahuluan yang penulis lakukan, di Kantor Dinas Pendidikan Kota Denpasar pada Tahun 2024 telah berdiri sebanyak 408 satuan PAUD (data pada Dinas Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2024). Jika merujuk pada data kuantitatif tentang sebaran PAUD di Kota Denpasar, terutama dilihat dari proporsi luas wilayah dan kekerapan penduduknya, distribusi keberadaan satuan PAUD di Kota Denpasar sudah cukup proporsional (dokumen peta wilayah Kodya Denpasar dan hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Pada tanggal 28 Oktober 2024). Distribusi satuan PAUD menurut Kecamatan adalah: (1) Denpasar Timur sebanyak 83 satuan; Denpasar Barat sebanyak 111 satuan, Denpasar utara sebanyak 94 satuan.

PAUD yang pada mulanya dirancang sebagai Pendidikan prasekolah yang lebih ditujukan sebagai menu awal bagi anak agar mereka memiliki kesiapan yang

lebih, dalam manapaki pendidikan formal, kini dapat dinyatakan hampir menjadi kebutuhan setiap orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya di PAUD sebelum melangkah ke Pendidikan formal.

Euforia ini sejatinya sangat positif dan prospektif, Mengapa? Karena dalam 4 atau lima tahun terakhir, pendirian PAUD (di Kota Denpasar) sesuai *locus* penelitian sudah mencapai 408 satuan PAUD. Yang menarik dan menjadi *underline* bagi tema kajian dalam penelitian ini, bahwa PAUD yang banyak itu, ada yang pendiriannya dilakukan oleh Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan, ada pula PAUD yang didirikan dengan payung dari pemerintah dalam hal ini Depdikbud Kota Denpasar, dan bahkan yang menempati posisi teratas adalah satuan PAUD yang dikelola oleh Banjar-Banjar Dinas di lingkungan Kota Denpasar.

Beragamnya pengelola dan penyelenggara PAUD, pada satu sisi merupakan masalah, karena fenomena ini menggambarkan besarnya partisipasi masyarakat untuk bersergi menggarap satuan pendidikan prasekolah ini. Namun pada sisi yang lain akibat banyaknya model pengelolaan PAUD yang terjadi, maka cara ini benar-benar sangat memprihatinkan karena keragaman tata-kelola boleh jadi menimbulkan keragaman mutu. Keragaman mutu seperti ditengarai tersebut, jelas hal yang tidak diharapkan.

Mengatasi persoalan inilah Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Denpasar akhirnya mencoba menempuh strategi dengan melakukan evaluasi atas pengelolaan PAUD, baik sisi tata-kelola administratifnya, maupun tata-kelola akademiknya. Sehingga melalui parameter itu ditetapkan satu kebijakan strategis yakni melakukan sigi kualitatif terhadap pengelolaan PAUD, yang kemudian

melalui pemetaan mutu yang didapatkan, dipilih strategi mengelompokkan beberapa PAUD unggulan, yang diberi pembinaan khusus, dan muaranya ditasbihkan penghargaan dengan identitas PAUD sebagai Sekolah Penggerak. Hal-hal positif yang diharapkan terjadi dengan penetapan PAUD Penggerak ini adalah: (1) Terdapat satuan PAUD yang tata-kelolanya secara *holistic* cukup bagus; (2) Alur Pembinaan dapat dilaksanakan dengan tepat arah dan tepat sasaran; (3) Terpenting bahwa PAUD Penggerak ini dapat mengimbaskan berbagai kebijakan dan sekaligus *best practices*, kepada Satuan PAUD lainnya, sehingga homogenitas mutu pengelolaan dapat disetarakan, yang pada akhirnya membuat kualitas seluruh PAUD bisa ditingkatkan. Strategi ini tentu tidak dimaksudkan untuk menafikan keragaman potensi masing-masing baik sarana-prasarana, maupun instrumental input yang lainnya. Namun dengan adanya kesatuan ritme pengelolaan melalui imbas dari PAUD Penggerak, pelan tapi pasti masalah yang diestafetkan diharapkan akan menjadi parameter bahwa mutu PAUD secara kualitatif bergerak ke *quadrant* yang menggembirakan. Fenomena inilah yang ditegaskan dengan kata “Dinamika” pada judul penelitian ini. Artinya bahwa hadirnya PAUD penggerak di Kota Denpasar telah mensinergi satuan-satuan PAUD lebih dinamis dalam sisi pengelolaan, karena memperoleh *best practice* dan *lesson learn* dari sejawatnya PAUD Penggerak.

PAUD Penggerak secara esensial memang didesain untuk dapat secara ajeg dan dengan keakurasian yang memadai dapat mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, sesuai filosofi Merdeka Belajar. Satuan PAUD Penggerak harus dapat mentransformasikan praktik Pendidikan yang holistik kepada peserta didik. Oleh

karena itu kurikulum yang dipentaskan fokus pada materi esensial, dengan tujuan terjadinya pemahaman dan pendalaman konsep oleh peserta didik. Melalui kurikulum ini diharapkan tidak terjadi praktik pembelajaran yang luas tetapi dangkal, namun benar-benar terimplementasi praktik pembelajaran spesifik dan mendalam.

Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas yang signifikan kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, kebutuhan belajar, dan konteks lingkungan sekolah masing-masing. Penggunaan asesmen formatif ditekankan sebagai bagian integral dari proses pembelajaran, bukan hanya sebagai alat evaluasi sumatif di akhir periode, melainkan sebagai mekanisme berkelanjutan untuk memberikan umpan balik dan melakukan perbaikan dalam proses belajar mengajar (Kemendikbudristek, 2022). Prinsip-prinsip ini secara keseluruhan bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan, bermakna, dan menyenangkan bagi peserta didik. Namun, bagaimana prinsip-prinsip ini diwujudkan dalam realitas pengalaman para pendidik di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memerlukan eksplorasi yang mendalam.

Guna memahami secara komprehensif fenomena implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat PAUD, penelitian ini mengadopsi pendekatan fenomenologis. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menginterpretasi makna serta esensi dari pengalaman subjektif kepala sekolah dan guru dalam proses mengadopsi dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan mereka. Pendekatan fenomenologis amat relevan karena berfokus pada pemahaman

mendalam tentang bagaimana individu memaknai dan mengkonstruksi realitas melalui pengalaman mereka (Creswell, 2018)

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menggali perspektif internal para pendidik sebagai pelaku utama dalam implementasi kurikulum, sehingga menghasilkan pemahaman yang kaya dan mendalam tentang fenomena ini dari sudut pandang mereka sendiri. Mempertimbangkan prinsip-prinsip fundamental Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada pendalaman pemahaman, pembelajaran kontekstual, fleksibilitas satuan pendidikan, dan asesmen formatif sebagai pilar transformasi pendidikan, maka penting untuk menempatkan inisiatif kurikuler ini dalam kerangka yang lebih luas mengenai esensi dan fungsi pendidikan itu sendiri.

Sejalan dengan tujuan penelitian fenomenologis untuk memahami pengalaman subjektif pendidik dalam implementasi Kurikulum Merdeka sebagai sebuah inovasi pendidikan, penting untuk mengaitkan upaya transformasi kurikuler ini dengan konsepsi fundamental mengenai hakikat dan peran pendidikan dalam tatanan masyarakat yang lebih luas. Pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan sebuah bangsa. Secara esensial, pendidikan adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu, baik secara intelektual, sosial, maupun emosional (Dewey, 2001). Lebih dari sekadar transfer pengetahuan, pendidikan juga mencakup pembentukan karakter, pengembangan keterampilan berpikir kritis, dan penanaman nilai-nilai luhur yang menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat (Freire,2020). Dalam konteks yang lebih luas,

pendidikan berfungsi sebagai agen perubahan sosial, yang mampu menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan (Nussbaum, 2016).

Pendidikan tidak hanya terbatas pada lingkungan formal seperti sekolah, tetapi juga mencakup pengalaman belajar di lingkungan keluarga, masyarakat, dan dunia kerja. Interaksi dengan lingkungan sekitar, akses terhadap informasi dan teknologi, serta partisipasi dalam kegiatan budaya dan sosial, semuanya berkontribusi pada proses pendidikan sepanjang hayat (*life-long learning*) (UNESCO, 2022). Oleh karena itu, pendidikan harus dirancang secara holistik dan kontekstual, dengan mempertimbangkan keberagaman latar belakang dan kebutuhan individu.

Pada era globalisasi dan revolusi industri 4.0, pendidikan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan juga dituntut untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21, seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah (OECD, 2020). Pendidikan harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral, kemampuan beradaptasi, dan semangat kewirausahaan.

Menyadari kompleksitas tantangan pendidikan di era globalisasi dan revolusi industri 4.0 yang menuntut pengembangan keterampilan abad ke-21 serta pembentukan sumber daya manusia yang berintegritas dan adaptif, maka penekanan pada pendidikan sejak usia dini menjadi semakin esensial sebagai tahapan krusial dalam meletakkan fondasi yang kokoh bagi perkembangan individu secara holistik.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menempati posisi fundamental dalam lintasan perkembangan individu, mengingat tahapan ini merupakan fondasi krusial bagi kemajuan peserta didik di jenjang pendidikan selanjutnya. Periode usia dini diidentifikasi sebagai *golden age*, sebuah fase perkembangan otak yang eksponensial, di mana stimulasi dan pengalaman belajar yang diperoleh akan secara signifikan memengaruhi pembentukan konstruksi kognitif, afektif, dan psikomotorik anak di masa depan (Shonkoff, J.P., et al, 2000). Oleh karena itu, implementasi PAUD tidak terbatas pada pengembangan kognisi semata, melainkan mencakup penguatan yang holistik terhadap aspek fisik-motorik, sosial-emosional, bahasa, serta nilai agama dan moral.

Karakteristik distingtif PAUD terletak pada implementasi pendekatan pembelajaran berbasis bermain (*play-based learning*). Bermain merupakan modalitas alamiah bagi anak untuk mengakuisisi pengetahuan dan mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Melalui aktivitas bermain yang terstruktur maupun tidak terstruktur, anak berkesempatan untuk mengembangkan imajinasi, kreativitas, kompetensi sosial, serta kapasitas dalam memecahkan permasalahan (Piaget, 1952). Selain itu, PAUD juga mengedepankan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada anak (*child-centered approach*), di mana pendidik berperan sebagai fasilitator yang adaptif, mengakomodasi minat dan kebutuhan individual peserta didik dalam proses belajarnya.

Signifikansi PAUD terkonfirmasi melalui berbagai penelitian yang menunjukkan korelasi positif antara partisipasi dalam program PAUD berkualitas dengan luaran perkembangan yang unggul. Individu yang menerima pendidikan

PAUD cenderung menunjukkan prestasi akademik yang lebih baik, tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam jenjang pendidikan selanjutnya, serta prospek karir yang lebih menjanjikan di kemudian hari (Shavkatovna, 2023).

Sejumlah penelitian terkini mengafirmasi signifikansi strategis Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam upaya mengatasi disparitas sosial dan ekonomi di Indonesia. Kajian dari Kinasih, (2022) mengindikasikan bahwa intervensi PAUD yang berkualitas tinggi berpotensi menyediakan fondasi perkembangan yang lebih egaliter bagi anak-anak yang berasal dari beragam lapisan sosial ekonomi. Penelitian ini kemungkinan mengeksplorasi atribut spesifik dari program PAUD yang efektif dalam memitigasi kesenjangan, seperti kualitas interaksi pedagogis antara guru dan anak, kurikulum yang responsif terhadap keberagaman individual, serta pelibatan aktif orang tua, terutama dari kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Temuan dari Gultom & Rohaeti (2024) menyajikan bukti empiris mengenai peran PAUD sebagai wahana untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan meningkatkan peluang mobilitas sosial.

Dari sudut pandang pembangunan ekonomi, laporan atau studi yang dikeluarkan oleh World Bank, (2021) mengenai PAUD di Indonesia menyoroti keuntungan ekonomi jangka panjang dari investasi pada sektor ini. World Bank secara umum menekankan kontribusi PAUD terhadap peningkatan produktivitas angkatan kerja di masa depan, pengurangan beban biaya layanan sosial, serta peningkatan kualitas modal insani secara menyeluruh. Penelitian ini menyajikan data komparatif lintas negara atau studi kasus yang mengilustrasikan bagaimana perluasan akses terhadap PAUD berkualitas, khususnya bagi kelompok masyarakat

dengan tingkat pendapatan rendah, dapat menciptakan peluang yang lebih setara dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi antar generasi.

Sebagai organisasi yang memiliki mandat untuk mempromosikan kesejahteraan anak, publikasi UNICEF Indonesia pada tahun 2024 menyoroti dimensi sosial dan pemenuhan hak anak terkait akses terhadap PAUD berkualitas. Laporan ini menekankan bagaimana PAUD dapat menyediakan lingkungan yang aman, menstimulasi perkembangan, dan bersifat inklusif bagi seluruh anak, tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi mereka. UNICEF Indonesia, (2024) menyajikan data mengenai disparitas partisipasi PAUD antar kelompok masyarakat yang berbeda dan mengadvokasi implementasi kebijakan yang menjamin akses universal terhadap layanan PAUD berkualitas sebagai langkah fundamental dalam mengurangi disparitas sosial dan memberikan kesempatan yang adil bagi perkembangan optimal setiap anak.

Penelitian-penelitian ini secara konsisten menyoroti bahwa partisipasi dalam program PAUD berkualitas memberikan landasan yang kokoh bagi perkembangan kognitif, sosial-emosional, dan bahasa anak-anak dari beragam latar belakang sosio-ekonomi, yang pada gilirannya berpotensi mengurangi kesenjangan di masa depan (Gultom et al., 2024). Analisis kebijakan dan laporan dari BKP kemendikbudristek, (2021) serta UNICEF (2022) menekankan bahwa perluasan akses dan peningkatan mutu PAUD merupakan instrumen krusial dalam mengatasi disparitas dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Lebih lanjut, Bank Dunia (2021) menyoroti pentingnya investasi dalam PAUD sebagai strategi kunci untuk meningkatkan modal manusia dan mengurangi

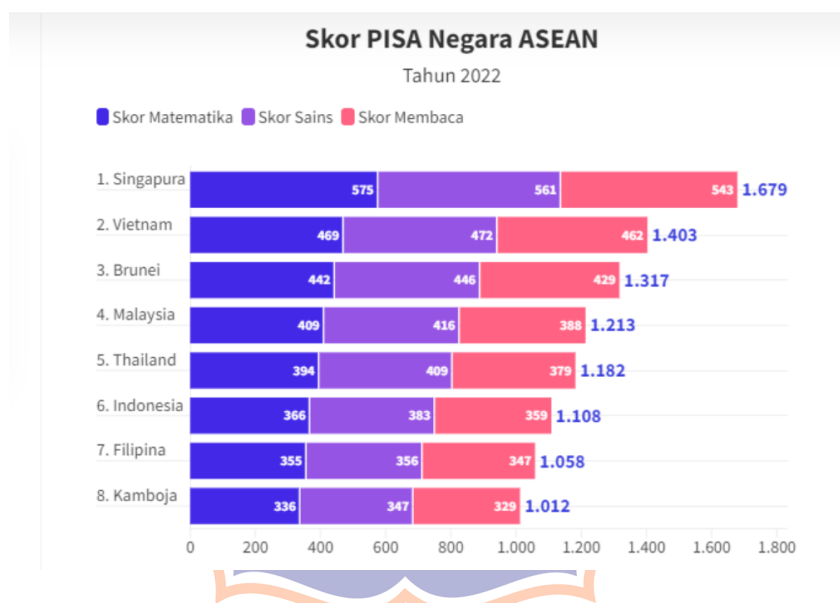
ketidaksetaraan, didukung oleh bukti global dan lokal mengenai dampak positif PAUD berkualitas terhadap hasil belajar dan perkembangan anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Selaras dengan temuan berbagai penelitian yang menggarisbawahi peran fundamental PAUD berkualitas dalam meminimalkan disparitas perkembangan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, inisiatif implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia, yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2022, mengusung semangat yang sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut melalui penekanan pada pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik.

Kurikulum Merdeka merupakan paradigma baru dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum operasional yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing. Kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dengan fokus pada pengembangan karakter dan kompetensi abad ke-21.

Kelahiran Kurikulum Merdeka di Indonesia dilatarbelakangi oleh imperatif untuk mengatasi krisis pembelajaran (*learning crisis*) yang terkonfirmasi melalui berbagai studi internasional, termasuk Programme for International Student Assessment (PISA). Hasil PISA secara konsisten menunjukkan capaian belajar siswa Indonesia yang relatif rendah dalam literasi, numerasi, dan sains dibandingkan dengan negara-negara lain (OECD, 2020). Situasi ini diperparah oleh pandemi COVID-19 yang mengakibatkan disrupsi signifikan dalam proses

pembelajaran dan memperdalam ketertinggalan belajar (*learning loss*) di berbagai jenjang pendidikan. Data Asesmen Nasional juga mengindikasikan adanya proporsi peserta didik yang substansial mengalami kesulitan dalam penguasaan kompetensi fundamental literasi dan numerasi, memperkuat urgensi intervensi kurikuler yang komprehensif. Kurikulum Merdeka hadir sebagai respons strategis untuk mengakselerasi pemulihan pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan secara nasional.



Gambar 1. 1
Skor PISA Negara ASEAN (Sumber OECD 2022)

Analisis terhadap skor PISA negara-negara ASEAN tahun 2022 memberikan konteks empiris yang krusial dalam memahami dampak *learning loss* di Indonesia. Data skor PISA 2022 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-6 dari 8 negara ASEAN yang datanya tersedia, dengan skor rata-rata untuk Matematika (366), Sains (383), dan Membaca (359). Skor ini secara keseluruhan menempatkan Indonesia di bawah rata-rata skor PISA global dan juga di bawah beberapa negara tetangga di kawasan ASEAN, seperti Singapura,

Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Perbandingan ini mengindikasikan adanya tantangan signifikan dalam capaian belajar siswa Indonesia pada ketiga domain literasi yang diukur oleh PISA. Meskipun PISA 2022 dilaksanakan setelah periode puncak pandemi COVID-19, hasil ini kemungkinan besar masih mencerminkan dampak *learning loss* yang telah terjadi akibat disruption pembelajaran selama masa pandemi.

Korelasi antara hasil PISA 2022 dan fenomena *learning loss* di Indonesia semakin menguat apabila mempertimbangkan studi-studi sebelumnya yang telah memprediksi potensi penurunan skor akibat pandemi (OECD, 2023). Meskipun belum ada data PISA Indonesia sebelum dan sesudah pandemi yang dapat dibandingkan secara langsung dalam satu siklus penilaian (mengingat PISA 2021 diundur ke 2022), posisi relatif Indonesia dalam perbandingan regional ASEAN memberikan gambaran bahwa pemulihan pembelajaran pasca-pandemi memerlukan upaya yang berkelanjutan dan terfokus. Implementasi Kurikulum Merdeka, dengan penekanan pada materi esensial, pembelajaran yang relevan, dan asesmen formatif, menjadi salah satu strategi kunci pemerintah Indonesia dalam mengatasi *learning loss* dan berupaya meningkatkan kualitas pendidikan yang tercermin dalam potensi perbaikan skor PISA di masa mendatang (Kemendikbudristek, 2022).

Landasan kebijakan Kurikulum Merdeka yang berakar pada regulasi pendidikan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam melakukan reformasi pendidikan yang sistematis. Keselarasan filosofis

Kurikulum Merdeka dengan visi Merdeka Belajar, yang menekankan pada kemerdekaan belajar siswa, keleluasaan mengajar guru, dan otonomi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, menjadi fondasi ideologis bagi upaya peningkatan mutu pendidikan. Karakteristik utama Kurikulum Merdeka, termasuk fokus pada materi esensial, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan Profil Pelajar Pancasila, fleksibilitas kurikulum operasional, dan pemanfaatan asesmen formatif, dirancang secara komprehensif untuk mengatasi tantangan *learning loss* yang teridentifikasi melalui hasil PISA 2022 dan Asesmen Nasional.

Dengan mempertimbangkan posisi Indonesia dalam skor PISA 2022 di kawasan ASEAN, implementasi Kurikulum Merdeka menjadi semakin krusial sebagai strategi intervensi yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam capaian belajar siswa. Fokus pada materi esensial bertujuan untuk memastikan penguasaan konsep yang mendalam, yang menjadi fondasi penting untuk meningkatkan literasi, numerasi, dan sains yang diukur dalam PISA. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 dan pemahaman kontekstual, yang relevan dengan tuntutan asesmen internasional. Fleksibilitas kurikulum di tingkat satuan pendidikan memungkinkan adaptasi terhadap kebutuhan lokal dan karakteristik siswa, yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Lebih lanjut, penggunaan asesmen formatif secara berkelanjutan memberikan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan pembelajaran yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan individual siswa, yang pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan skor PISA di masa mendatang (Kemendikbudristek, 2022).

Mempertimbangkan urgensi peningkatan kualitas pendidikan nasional yang tercermin dalam capaian PISA dan upaya implementasi Kurikulum Merdeka sebagai strategi intervensi, maka penting untuk menempatkan penelitian ini dalam konteks program yang secara spesifik dirancang untuk mengakselerasi transformasi pendidikan di Indonesia, yaitu Program Sekolah Penggerak (PSP). Program Sekolah Penggerak (PSP) hadir sebagai terobosan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, bukan hanya melalui perubahan kurikulum, tetapi lebih mendasar lagi, melalui transformasi tata kelola pendidikan. Program ini bertujuan untuk membentuk satuan pendidikan yang berotonomi dalam pengelolaan, memiliki kepemimpinan transformasional, dan membangun komunitas belajar (Kombel) yang kuat sebagai poros pengambilan keputusan. Dengan demikian, PSP tidak hanya mengubah cara mengajar, tetapi juga cara mengelola sekolah, dengan memberdayakan guru dan kepala sekolah sebagai agen perubahan

Fokus utama program ini terletak pada pemberdayaan kapasitas kepala sekolah dan guru, dengan harapan Sekolah Penggerak akan berfungsi sebagai katalisator perubahan. Kebijakan formal yang melandasi implementasi PSP tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 162/M/2021. Lebih lanjut, Sekolah Penggerak menerima pendampingan intensif selama tiga tahun dari Kemendikbudristek, yang meliputi pelatihan, bimbingan teknis, serta dukungan sumber daya yang komprehensif.

Proses seleksi untuk menjadi Sekolah Penggerak menerapkan standar yang ketat, melibatkan evaluasi portofolio, wawancara mendalam, dan uji kompetensi yang komprehensif. Kriteria utama yang diharapkan dari calon Sekolah Penggerak

mencakup komitmen yang kuat terhadap perubahan, keberadaan kepala sekolah dan guru dengan kompetensi yang memadai, serta dukungan aktif dari pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Konseptualisasi "sekolah penggerak" ini memiliki resonansi dengan teori difusi inovasi, yang menyatakan bahwa entitas terpilih dapat berperan sebagai agen perubahan yang menyebarkan praktik-praktik unggul ke lingkungan sekitarnya (Rogers, 1987).

Kebijakan Program Sekolah Penggerak (PSP) dan implementasi Kurikulum Merdeka merupakan respons terhadap tantangan dan kebutuhan mendesak dalam lanskap pendidikan Indonesia. Beberapa faktor yang melatarbelakangi kebijakan ini meliputi krisis pembelajaran yang terkonfirmasi melalui studi internasional seperti PISA, yang diperparah oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan *learning loss* signifikan. Selain itu, tuntutan keterampilan abad ke-21, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi, memerlukan kurikulum yang lebih adaptif dan relevan. Kurikulum Merdeka dirancang untuk mengatasi keterbatasan kurikulum sebelumnya dengan menawarkan fleksibilitas bagi sekolah dalam mengembangkan kurikulum operasional yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan unik siswa, sejalan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang didukung oleh teori konstruktivisme ((Vygotsky, 1978) dalam Saleem & Deeba, 2021).

Implementasi Kurikulum Merdeka bukan sekadar adopsi kebijakan baru, melainkan menjadi katalisator bagi perubahan tata kelola internal. Ia memberi otoritas kepada guru untuk merancang pembelajaran, yang pada gilirannya menuntut adanya sistem pengelolaan yang lebih partisipatif dan fleksibel.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bukan sekadar tahap persiapan menuju sekolah formal ia adalah masa kritis ketika fondasi kognitif, emosional, sosial, dan moral anak dibentuk. Neurosains perkembangan menegaskan bahwa pengalaman awal yang kaya, responsif, dan aman membentuk arsitektur otak yang menentukan kapasitas belajar, regulasi diri, dan keterlibatan sosial sepanjang hidup (Shonkoff et al., 2012). Di usia ini, anak bukan “calon pelajar”, melainkan pembelajar aktif yang membangun pemahaman melalui bermain, eksplorasi, dan relasi. Oleh karena itu, kualitas transformasi pendidikan nasional seperti Kurikulum Merdeka tidak dapat diukur hanya dari jenjang sekolah menengah ke atas, melainkan dari sejauh mana ia berakar dan dihayati di tingkat PAUD, tempat hakikat “merdeka belajar” paling murni diwujudkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal dengan sejumlah kepala sekolah dan guru di Kota Denpasar, teridentifikasi adanya tantangan signifikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai, serta minimnya partisipasi dan dukungan dari orang tua murid dalam proses adaptasi kurikulum baru ini. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga telah secara aktif mendorong satuan pendidikan untuk mengikuti seleksi Program Sekolah Penggerak (PSP) sejak tahun 2020 hingga 2023. Upaya ini membuahkan hasil dengan Lolosnya 21 satuan PAUD sebagai Sekolah Penggerak dan terpilihnya 17 Satuan PAUD sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak yang terbagi dalam tiga angkatan pelaksanaan hingga

tahun 2023. Keberhasilan lolos seleksi ini mengindikasikan adanya respons positif terhadap inisiatif pemerintah dalam mengakselerasi transformasi pendidikan.

Tabel. 1.
Data PSP Kota Denpasar

No	Nama Satuan PAUD	Status	Status Kandidat	Angkatan
1	Tk Widya Bhakti	Swasta/ Yayasan	Reguler	2
2	TK Galang Kasih	Swasta/ Yayasan	Reguler	2
3	TK Dharma Putra	Swasta/ Banjar	Reguler	2
4	TK Bintang Permata	Swasta/ Yayasan	Reguler	2
5	TK Putra Udyana	Swasta/ Kelurahan	Reguler	2
6	TK Uma Werdhi Kumara	Swasta/ Banjar	Reguler	2
7	TK Tuna Rungu Sushrusa	Swasta/ Yayasan	Reguler	3
8	TK Chis	Swasta/ Yayasan	Reguler	Tidak masuk Kuota
9	TK Sekar Tunas Mandiri	Swasta/ Yayasan	Reguler	3
10	TK Bumi Sari	Swasta/ Desa	Reguler	3
11	TK Al-Amin	Swasta/ Yayasan	Reguler	3
12	TK Sang Tunas	Swasta/ Yayasan	Reguler	2
13	TK IT Albanna	Swasta/ Yayasan	Reguler	2
14	TK Tresnaning Kumara	Swasta/Desa	Reguler	Tidak masuk Kuota
15	TK Hainan School	Swasta/ Yayasan	Reguler	Tidak masuk Kuota
16	TK Kumara Sari	Swasta/ Desa	Reguler	Tidak masuk Kuota
17	TK Denpasar Children Centre (DCC)	Swasta/ Yayasan	Akselerasi 1	2
18	TK Universal	Swasta/ Yayasan	Akselerasi 1	2
19	TK Tunas Harapan	Swasta/ Yayasan	Akselerasi 1	1
20	TK Swadharna	Swasta/ Desa	Akselerasi 1	1
21	TK Sai Prema Kumara	Swasta/ Yayasan	Akselerasi 1	1

(Sumber: Dinas Dikpora Kota Denpasar)

Kendati demikian, data yang terhimpun juga mengindikasikan adanya heterogenitas kesiapan internal satuan pendidikan dalam mengakomodasi paradigma perubahan yang dipersyaratkan oleh Program Sekolah Penggerak, terlepas dari keberhasilan mereka dalam proses seleksi. Fenomena ini dapat dianalisis melalui perspektif *institutional isomorphism*, di mana organisasi (dalam hal ini, satuan pendidikan) cenderung meniru praktik-praktik yang dianggap legitim

atau mendapatkan dukungan dari lingkungan eksternal (DiMaggio & Powell, 1983 dalam Fany, 2022).

Pada situasi ini, motivasi awal untuk mengikuti seleksi PSP mungkin lebih didorong oleh insentif eksternal atau tekanan normatif daripada internalisasi mendalam terhadap filosofi dan tujuan perubahan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, meskipun telah terpilih sebagai Sekolah Penggerak, beberapa satuan PAUD di Denpasar masih memerlukan penguatan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Kurikulum Merdeka serta pengembangan kapasitas yang berkelanjutan untuk mewujudkan transformasi pendidikan yang substantif (Fullan, 2016).

Pada realitas implementasi Kurikulum Merdeka di satuan PAUD Kota Denpasar, keberhasilan seleksi PSP tidak secara otomatis menjamin internalisasi mendalam terhadap filosofi dan prinsip Kurikulum Merdeka. Dalam situasi ini, peran kepala sekolah dan guru menjadi krusial sebagai agen perubahan internal. Kepala sekolah, sebagai pemimpin satuan pendidikan, memiliki tanggung jawab untuk memvisualisasikan dan mengkomunikasikan visi perubahan Kurikulum Merdeka kepada seluruh komunitas sekolah, termasuk guru, tenaga kependidikan, dan orang tua murid. Kepemimpinan yang transformasional dan suportif dari kepala sekolah akan memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam mengenai tujuan dan manfaat Kurikulum Merdeka, mengatasi resistensi terhadap perubahan, serta menciptakan budaya belajar dan inovasi di lingkungan sekolah (Leithwood et al., 2006).

Lebih lanjut, guru sebagai garda terdepan dalam implementasi kurikulum di kelas memiliki peran sentral dalam menerjemahkan prinsip-prinsip Kurikulum

Merdeka ke dalam praktik pembelajaran yang efektif dan relevan bagi anak usia dini. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, sebagaimana diidentifikasi dalam hasil observasi awal, menggarisbawahi perlunya pengembangan profesional berkelanjutan bagi para guru. Guru yang memiliki pemahaman mendalam tentang karakteristik perkembangan anak usia dini, prinsip pembelajaran berbasis bermain, dan strategi pembelajaran berdiferensiasi akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang merdeka, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik (Piaget, 1952 & Vygotsky, 1978). Oleh karena itu, investasi dalam peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru, melalui pelatihan yang relevan dan pendampingan yang berkelanjutan, menjadi imperatif untuk memastikan bahwa partisipasi dalam PSP tidak hanya sekadar respons terhadap tekanan eksternal, tetapi juga diiringi dengan transformasi praktik pendidikan yang substantif di tingkat PAUD Kota Denpasar.

Pemilihan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terpilih sebagai pelaksana program sekolah penggerak sebagai subjek penelitian didasarkan pada keragaman karakteristik pendirian, kepemilikan (desa/masyarakat, yayasan), latar belakang sosio-ekonomi peserta didik, serta variasi sumber daya dan aset yang dimiliki oleh masing-masing satuan. Heterogenitas ini menjadikan PAUD sebagai konteks yang kaya untuk mengeksplorasi dinamika implementasi kebijakan pendidikan, termasuk Kurikulum Merdeka, dalam setting yang berbeda-beda. Variasi ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola adaptasi, tantangan, dan keberhasilan implementasi yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual spesifik pada setiap satuan PAUD, sehingga memberikan

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses perubahan kurikulum di tingkat akar rumput.

Walaupun Kurikulum Merdeka digagas sebagai kerangka kurikuler yang inovatif dan adaptif, realitas implementasinya di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) justru mengungkap dinamika yang kompleks, di mana terjadi diskrepansi antara ekspektasi teoretis dalam dokumen kebijakan dengan pengalaman subjektif para pendidik di lapangan. Adanya jarak antara naskah kebijakan dan realitas kelas ini menjadi landasan urgensi penelitian, karena pemahaman mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dihayati, diinterpretasi, dan diimplementasikan dalam praktik sehari-hari masih sangat diperlukan. Penelitian fenomenologis ini dipandang krusial untuk menjembatani divergensi tersebut, dengan menggali esensi pengalaman kepala sekolah dan guru dalam proses transformasi di Kota Denpasar.

Pada kondisi ini, implementasi Kurikulum Merdeka bukan sekadar adopsi kebijakan, melainkan berfungsi sebagai katalisator bagi perubahan tata kelola internal, yang memberi otoritas kepada guru untuk merancang pembelajaran secara mandiri, sekaligus menuntut terbentuknya sistem pengelolaan yang lebih partisipatif, fleksibel, dan berakar pada komunitas belajar. Bertitik tolak pada pentingnya penelitian ini dalam memahami divergensi pemahaman antara ekspektasi kebijakan Kurikulum Merdeka dan realitas pengalaman pendidik di tingkat PAUD, maka penting untuk menyoroti perubahan lanskap kebijakan terkait program Sekolah Penggerak yang memiliki implikasi terhadap konteks penelitian ini.

Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/M/2025 telah mencabut Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak. Keputusan ini secara resmi mengakhiri keberlakuan program Sekolah Penggerak (Kemendasmen, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, satuan pendidikan PAUD yang pernah berstatus sebagai Sekolah Penggerak tetap relevan dan dapat dijadikan subjek penelitian ini dengan beberapa alasan fundamental. Satuan pendidikan tersebut telah memiliki pengalaman yang signifikan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, yang merupakan inti dari program Sekolah Penggerak. Pengalaman ini mencakup proses adaptasi, pelatihan guru, pengembangan perangkat ajar, serta interaksi dengan pendampingan yang diberikan selama periode keikutsertaan dalam program. Jejak implementasi Kurikulum Merdeka dan perubahan-perubahan yang telah terjadi di satuan pendidikan tersebut masih melekat dan dapat dianalisis secara mendalam.

Walaupun status Sekolah Penggerak telah dicabut, dampak dan internalisasi nilai-nilai serta praktik-praktik Kurikulum Merdeka yang telah terbangun di satuan pendidikan tersebut kemungkinan besar masih berlanjut. Kepala sekolah dan guru yang telah mengikuti dan terlibat aktif dalam program Sekolah Penggerak memiliki potensi untuk terus mengimplementasikan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dalam praktik pembelajaran mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi jendela kritis untuk menyelami dinamika keberlanjutan implementasi Kurikulum Merdeka pasca-berakhirnya Program Sekolah Penggerak, mengungkap tantangan yang

dihadapi, dan memahami strategi adaptasi mandiri yang dirancang oleh satuan pendidikan. Dengan demikian, eksplorasi terhadap satuan PAUD eks-Sekolah Penggerak di Kota Denpasar bukan sekadar menelusuri jejak sebuah program, melainkan membongkar realitas implementasi Kurikulum Merdeka secara utuh dan mendalam di tingkat akar rumput.

Penting untuk menggali secara reflektif dinamika pengelolaan PAUD eks-Sekolah Penggerak, khususnya dari lensa tata kelola, untuk memahami bagaimana institusi-institusi ini merespons perubahan besar yang mengguncang fondasi pendidikan anak usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap proses transformasi tata kelola yang hidup, mengeksplorasi dampak mendalam inovasi terhadap pengelolaan internal, dan mengungkap mekanisme yang dibangun secara kolektif untuk mempertahankan ruh perubahan, bahkan ketika dukungan eksternal telah berakhir.

Namun, ketahanan sebuah lembaga atau yang dalam literatur disebut sebagai resiliensi organisasi tidak tumbuh begitu saja. Ia tidak muncul hanya karena program pernah datang dan pergi. Ketahanan itu dibangun perlahan, dari dalam, melalui cara satuan PAUD mengelola dirinya sendiri: mulai dari bagaimana mereka merancang pembelajaran, menilai perkembangan anak, mendokumentasikan proses, hingga memimpin tim guru. Di titik inilah pembelajaran mendalam (*deep learning*) menemukan maknanya yang paling utuh.

Dalam Naskah Akademik Pembelajaran Mendalam (Kemendikdasmen, 2025), *deep learning* bukan sekadar teknik mengajar. Ia adalah filosofi: keyakinan bahwa belajar yang bermakna lahir ketika anak menggunakan seluruh dirinya

pikiran, perasaan, indra, dan tubuh dalam pengalaman yang utuh dan relevan. Di lapangan, prinsip ini ternyata tidak hanya hidup di dalam kelas, tetapi juga menembus tata kelola sekolah itu sendiri. Ia mewujudkan dalam modul ajar yang mengikuti minat anak, dalam asesmen yang melihat proses, bukan hanya hasil, dalam arsip digital yang menjadi “ingatan bersama”, dan dalam gaya kepemimpinan yang mendengarkan, bukan mengatur.

Temuan awal menunjukkan bahwa satuan PAUD yang tetap kokoh setelah program berakhir bukanlah yang paling pandai mengikuti panduan, melainkan yang menghayati Kurikulum Merdeka sebagai cara hidup bersama sebagai etika pengelolaan, bukan sekadar metode mengajar. Mereka membangun sistem internal yang mandiri: pelatihan yang dipimpin oleh guru senior, Komunitas Belajar (Kombel) yang menjadi ruang dialog nyata, dan dokumentasi yang terus dipelihara sebagai warisan kolektif. Semua ini bukan sekadar strategi, melainkan ekspresi dari komitmen terhadap pendekatan pendidikan yang holistik dan berkelanjutan.

Dari sinilah penelitian ini lahir untuk memahami bagaimana *deep learning* dan resiliensi institusional saling menopang dalam membangun tata kelola PAUD yang tidak hanya bertahan, tetapi terus tumbuh berakar pada budaya lokal, merdeka dalam jiwa, dan mandiri dalam tindakan.

1.2 Identifikasi Masalah

Program Sekolah Penggerak (PSP) hadir sebagai upaya sistematis untuk memperkuat tata kelola satuan pendidikan melalui pendekatan kolaboratif, reflektif, dan berbasis komunitas. Di Kota Denpasar, penetapan sejumlah satuan PAUD sebagai bagian dari PSP tidak hanya mencerminkan apresiasi terhadap kinerja awal

mereka, tetapi juga menempatkan mereka pada posisi strategis: sebagai pilot yang diharapkan mampu menginternalisasi filosofi Kurikulum Merdeka dan mengimbaskan praktik baik kepada sesama. Namun, harapan tersebut berhadapan dengan realitas yang kompleks khususnya ketika dukungan eksternal berakhir dan status “Sekolah Penggerak” berpotensi dicabut.

Dalam konteks inilah sejumlah ketegangan muncul, yang menjadi dasar identifikasi masalah dalam penelitian ini. Tidak semua satuan mampu mempertahankan dinamika tata kelola yang telah dibangun selama program berlangsung. Sementara sebagian satuan terus mengembangkan Komunitas Belajar (Kombel) yang hidup, dokumentasi pembelajaran yang sistematis, dan kepemimpinan yang partisipatif, satuan lain justru kembali ke pola birokratis lama. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bukanlah hasil otomatis dari intervensi eksternal, melainkan bergantung pada kapasitas internal yang belum sepenuhnya dipahami suatu bentuk resiliensi institusional yang perlu diungkap secara empiris.

Makna “pelaksanaan Kurikulum Merdeka” masih sering disempitkan pada dimensi teknis, seperti penyusunan modul ajar atau pelaporan administratif. Padahal, filosofi Kurikulum Merdeka khususnya prinsip pembelajaran mendalam (deep learning) menekankan integrasi olah pikir, hati, rasa, dan raga dalam pengalaman belajar yang utuh. Temuan awal menunjukkan bahwa di beberapa satuan eks-Penggerak, prinsip ini tidak hanya hidup di kelas, tetapi juga menjadi fondasi tata kelola: dalam asesmen formatif, perencanaan kolaboratif, bahkan dalam cara kepala sekolah memimpin tim. Namun, bagaimana deep learning

bertransformasi dari pendekatan pedagogis menjadi etika pengelolaan mikro masih menjadi pertanyaan terbuka.

Proses pengimbasan yang menjadi salah satu pilar PSP tidak selalu berjalan lancar. Meskipun di satu sisi satuan eks-Penggerak membuka diri melalui kunjungan kelas, pelatihan, dan berbagi modul, di sisi lain muncul hambatan struktural seperti keterbatasan waktu, beban kerja guru, dan ketidakseimbangan insentif. Lebih dalam lagi, pengimbasan yang efektif ternyata tidak bergantung pada otoritas formal, melainkan pada kredibilitas praktik dan solidaritas profesional. Ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana dinamika pengimbasan berlangsung secara organik dalam ekosistem pendidikan lokal yang berakar pada budaya gotong royong?

Kontekstualisasi kebijakan nasional dalam realitas lokal tidak terjadi secara netral. Di Bali, nilai-nilai seperti Tri Hita Karana yang menekankan harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam menjadi referensi Kurikulum Merdeka dihayati dan diwujudkan. Namun, peran nilai lokal sebagai mediator epistemologis yaitu jembatan antara kebijakan pusat dan praktik akar rumput belum dieksplorasi secara mendalam dalam literatur maupun kebijakan.

Dari ketegangan-ketegangan inilah muncul inti masalah penelitian, bagaimana satuan PAUD eks-Sekolah Penggerak di Kota Denpasar membangun tata kelola yang berkelanjutan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, di tengah ketidakpastian pasca-program, dan bagaimana dinamika tersebut dibentuk oleh interaksi antara prinsip pedagogis, kapasitas institusional, dan akar budaya lokal?

Identifikasi masalah ini tetap berpijak pada empat fokus awal penelitian penetapan PAUD Penggerak, transformasi tata kelola, strategi pengimbasan, dan rasional implementasi Kurikulum Merdeka namun diperdalam melalui lensa konseptual yang lebih kritis dan kontekstual, sesuai tuntutan diskursus akademik terkini.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memfokuskan kajian pada dinamika pengelolaan PAUD eks-Sekolah Penggerak di Kota Denpasar dalam konteks pasca-pencabutan status program, dengan tetap berpijak pada empat pertanyaan utama yang telah dirumuskan. Secara operasional, penelitian ini membatasi lingkup analisis pada aspek-aspek berikut:

1. Rasional dan proses penetapan satuan PAUD sebagai Sekolah Penggerak di Kota Denpasar, termasuk pertimbangan teknis, kapasitas institusional, serta seleksi sepenuhnya peran pemerintah daerah;
2. Tata kelola internal satuan PAUD selama dan setelah mengikuti Program Sekolah Penggerak, khususnya dalam hal struktur kepemimpinan, pengambilan keputusan, kolaborasi guru, dan integrasi prinsip Kurikulum Merdeka dalam praktik sehari-hari adalah dinamika baru efek dari poin 1 di atas.
3. Strategi dan bentuk pengimbasan tata kelola yang dikembangkan oleh satuan PAUD Penggerak kepada sejawat PAUD lainnya di Kota Denpasar, dilakukan melalui kunjungan, pelatihan informal, maupun jejaring komunitas belajar;

4. Rasional dan urgensi penerapan Kurikulum Merdeka di tingkat PAUD, termasuk bagaimana prinsip pembelajaran mendalam (*deep learning*), otonomi guru, dan nilai lokal Tri Hita Karana dan gotong royong dihayati sebagai fondasi pedagogis dalam pemutakhiran dinamika tata kelola PAUD.

Penelitian ini tidak membahas implementasi Kurikulum Merdeka di jenjang SD/SLTP, evaluasi teknis terhadap struktur modul ajar, atau analisis kebijakan makro di tingkat nasional. Fokus tetap berada pada pengalaman pelaksana di tingkat mikro kepala sekolah, guru, pengawas, dan dinas pendidikan Kota Denpasar dan bagaimana mereka memaknai, mengelola, serta mempertahankan transformasi pendidikan dalam realitas lokal mereka.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah rasional dan bagaimana proses penetapan PAUD sebagai Sekolah Penggerak di Kota Denpasar
2. Bagaimanakah dinamika Tata Kelola PAUD pada Sekolah penggerak di Kota Denpasar
3. Bagaimanakah Upaya pengimbasan tata-kelola Sekolah Penggerak kepada sejawat PAUD lainnya di Kota Denpasar, agar dinamikanya terhimbaskan.
4. Bagaimanakah implementasi Kurikulum Merdeka (Rasional dan Urgensinya) untuk PAUD di Kota Denpasar
5. Apakah antisipasi yang dirancang, jika Program Sekolah Penggerak dicabut untuk PAUD di Kota Denpasar agar keberlanjutan kultur positifnya dapat dipertahankan.

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan rasional dan proses penetapan PAUD sebagai Sekolah Penggerak di Kota Denpasar
2. Untuk menarasikan sisi-sisi unggul Tata Kelola PAUD pada Sekolah penggerak di Kota Denpasar
3. Untuk mendeskripsikan langkah-langkah pengimbasan tata-kelola PAUD Sekolah Penggerak kepada sejawat Paud lainnya di Kota Denpasar
4. Untuk menarasikan rasional dan urgensi implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah PAUD Penggerak di Kota Denpasar
5. Untuk mengantisipasi langkah-langkah antisipatif yang dirancang bagi keberlanjutan kultur positif yang terjadi, jika Program Sekolah Penggerak dicabut

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan keilmuan dibidang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan teori kebijakan pendidikan, khususnya dalam konteks implementasi kurikulum berbasis otonomi, transformasi tata kelola, dan keberlanjutan pasca-intervensi eksternal. Berdasarkan temuan empiris yang mendalam, penelitian ini tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi juga memperkaya, memperdalam, dan memperluas kerangka teoretis yang ada melalui tiga sumbangan utama:

1. Penelitian ini memperkaya teori implementasi kebijakan pendidikan dengan menghadirkan bukti empiris tentang pergeseran dari model top-down ke model tata kelola partisipatif-kolaborasi. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan Kurikulum

Merdeka bukan ditentukan oleh kepatuhan administratif, melainkan oleh internalisasi filosofis khususnya prinsip pembelajaran mendalam (*deep learning*) oleh kepala sekolah dan guru. Proses ini mengungkap dimensi baru dalam teori implementasi: pergeseran dari compliance (kepatuhan) ke ownership (kepemilikan), di mana kebijakan nasional dihidupi sebagai mandat profesional, bukan perintah birokratis.

2. Penelitian ini mengkonstruksi model tata kelola PAUD berkelanjutan yang mengintegrasikan tiga pilar: (1) kepemimpinan transformasional yang berfungsi sebagai fasilitator, (2) Komunitas Belajar (Kombel) sebagai governing community tempat keputusan pedagogis dibuat secara kolektif, dan (3) otonomi profesional guru yang didukung sistem dokumentasi digital sebagai *organizational memory*. Model ini memperluas kerangka tata kelola pendidikan mikro dengan memasukkan dimensi resiliensi institusional dan kontekstualisasi budaya khususnya melalui integrasi nilai lokal Tri Hita Karana dan gotong royong sebagai fondasi epistemologis.
3. Penelitian ini memperdalam pemahaman tentang difusi inovasi dan keberlanjutan reformasi. Pengimbasan yang efektif tidak terjadi melalui instruksi vertikal, melainkan melalui jaringan horizontal berbasis kredibilitas praktik dan solidaritas profesional. Strategi seperti pelatihan mandiri, dokumentasi reflektif, dan reproduksi pengetahuan internal menjadi fondasi resiliensi institusional kemampuan satuan mempertahankan inovasi meskipun dukungan eksternal berakhir. Temuan ini memberikan kontribusi kritis bagi literatur keberlanjutan reformasi

pendidikan, yang sering gagal karena terlalu bergantung pada intervensi luar.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Kepala Sekolah dan Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi cermin reflektif untuk memahami pengalaman mereka dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, mengidentifikasi strategi adaptasi yang efektif, serta memperkuat kapasitas internal dalam membangun tata kelola yang partisipatif dan berkelanjutan..

2. Bagi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar

Penelitian ini memberikan umpan balik empiris tentang dinamika implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat PAUD pasca-pencabutan Program Sekolah Penggerak. Temuan ini dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan transisi, mekanisme pendampingan pasca-program, dan sistem pengimbasan berbasis komunitas yang lebih kontekstual dan berkelanjutan.

3. Bagi Peneliti

Model tata kelola dan kerangka analitis yang dikonstruksi dalam penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi lanjutan tentang implementasi Kurikulum Merdeka, resiliensi organisasi dalam pendidikan, atau adaptasi kebijakan berbasis kearifan lokal di wilayah lain.

1.7 Novelty (Kebaharuan)

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah yang tidak bersumber pada klaim “belum pernah diteliti”, melainkan pada konstruksi model tata kelola PAUD yang muncul dari sintesis kritis antara kebijakan nasional, prinsip pembelajaran mendalam (*deep learning*), dan kearifan lokal Tri Hita Karana khususnya dalam konteks pasca-Program Sekolah Penggerak. Berbeda dari studi-studi sebelumnya yang umumnya bersifat deskriptif, administratif, atau terbatas pada jenjang SD-SMP. Penelitian ini membedah juga bagaimana Kurikulum Merdeka diinternalisasi bukan sebagai serangkaian prosedur teknis, melainkan sebagai proses transformasi tata kelola mikro yang hidup, kolaboratif, dan berakar pada budaya.

Sejumlah penelitian memang telah mengeksplorasi Program Sekolah Penggerak (PSP) dan Kurikulum Merdeka, namun dengan keterbatasan yang justru membuka ruang bagi kontribusi orisinal penelitian ini. Misalnya, Misra, Widiyanti, & Prasetyo (2023) mengevaluasi dampak PSP di Jawa Tengah, tetapi hanya pada jenjang SD-SMP dan dengan fokus dominan pada aspek pelaporan serta ketaatan administratif. Studi semacam ini cenderung mengabaikan dimensi resiliensi institusional yaitu kemampuan satuan pendidikan untuk mempertahankan inovasi secara mandiri setelah dukungan eksternal berakhir. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Fullan (2016), keberlanjutan reformasi justru ditentukan bukan oleh kehadiran pendamping, melainkan oleh kapasitas internal yang hidup dan adaptif.

Lebih dari itu, konteks Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) nyaris terabaikan dalam literatur tersebut. Mayoritas penelitian termasuk Hamzah (2023)

masih berpusat pada jenjang sekolah dasar dan menengah, sehingga gagal menangkap kekhasan pedagogis PAUD yang berbasis bermain, relasional, dan holistik. Karakteristik ini menuntut pendekatan tata kelola yang tidak birokratis, melainkan partisipatif, fleksibel, dan berakar pada konteks lokal. Penelitian ini secara eksplisit menempatkan PAUD sebagai subjek utama transformasi tata kelola, bukan sebagai pelengkap atau perpanjangan dari model yang dikembangkan untuk jenjang formal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi celah empirik, tetapi juga mereposisi pusat analisis: dari administrasi menuju budaya organisasi, dari kepatuhan menuju otonomi profesional, dan dari kebijakan universal menuju penghayatan lokal yang bermakna.

Di sisi lain, sejumlah penelitian memang telah menyentuh konteks PAUD dalam implementasi Kurikulum Merdeka, namun dengan keterbatasan yang justru membuka ruang bagi kontribusi orisinal penelitian ini. Suardana, Wibawa, & Putri (2023), misalnya, mengkaji implementasi Kurikulum Merdeka di PAUD Kabupaten Buleleng, tetapi temuannya berhenti pada identifikasi tantangan teknis seperti keterbatasan kapasitas guru dalam menyusun modul ajar tanpa mengeksplorasi bagaimana satuan membangun mekanisme keberlanjutan mandiri pasca-program. Lebih dari itu, studi tersebut memandang Kurikulum Merdeka semata sebagai isu teknis di level guru, bukan sebagai etika tata kelola yang menyentuh struktur pengambilan keputusan, desain dokumentasi, atau peran kepemimpinan. Padahal, seperti ditegaskan dalam temuan penelitian ini, *deep learning* tidak hanya merupakan strategi mengajar, melainkan prinsip filosofis yang menjadi fondasi tata kelola mikro: ia terlihat dalam cara modul ajar dirancang secara kolaboratif,

asesmen dilakukan melalui observasi holistik, dan kepala sekolah berperan sebagai fasilitator, bukan pengawas.

Sementara itu, Rachman dkk. (2024) memandang pengimbasan sebagai difusi praktik teknis transfer alat atau metode dari satu satuan ke satuan lain bukan sebagai reproduksi budaya organisasi yang tumbuh melalui kepercayaan, kerentanan bersama, dan solidaritas profesional dalam Komunitas Belajar. Pendekatan semacam ini mengabaikan dimensi relasional yang justru menjadi inti keberlanjutan inovasi.

Lebih krusial lagi, fase pasca-program nyaris luput dari perhatian dalam literatur evaluatif. Studi seperti Misra dkk. (2023) hanya mengukur dampak selama program berlangsung fokus pada kepatuhan administratif dan pelaporan kinerja tanpa menjawab pertanyaan mendasar yang justru menjadi ujian sesungguhnya reformasi pendidikan, sebagaimana ditegaskan Fullan (2016): bagaimana satuan tetap bertahan setelah dukungan eksternal dicabut? Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan tersebut, dengan menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan hasil dari insentif eksternal, melainkan dibangun melalui kapasitas internal: pelatihan mandiri oleh guru senior, dokumentasi digital sebagai “memori organisasi”, dan budaya refleksi kolektif yang terus-menerus dipelihara.

Meskipun Ashfarina & Soedjarwo (2023) menyinggung pentingnya kolaborasi internal dan nilai lokal seperti gotong royong, mereka masih memosisikannya sebagai latar belakang kontekstual, bukan sebagai mediator epistemologis. Dalam penelitian ini, nilai-nilai seperti Tri Hita Karana dan gotong royong tidak ditambahkan dari luar sebagai hiasan budaya, melainkan berfungsi

sebagai lensa filosofis yang memungkinkan Kurikulum Merdeka dihayati bukan sebagai kebijakan impor dari pusat, tetapi sebagai ekspresi jati diri pedagogis yang autentik.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini bukan hanya topikal, tetapi konseptual: ia mereposisi Kurikulum Merdeka dari kebijakan yang diterapkan menjadi proses yang dihidupi, melalui sintesis antara prinsip pembelajaran mendalam, tata kelola partisipatif, dan akar budaya lokal. Pada konteks inilah kebaruan penelitian ini hadir melalui tiga sumbangan utama (1) Secara teoretis, penelitian ini memperluas makna *deep learning* yang dalam Naskah Akademik Pembelajaran Mendalam (Kemendikdasmen, 2025) didefinisikan sebagai integrasi olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga dari sekadar pendekatan pedagogis menjadi prinsip tata kelola. *Deep learning* dalam penelitian ini mewujudkan dalam:

- a. Perancangan modul ajar tematik yang responsif terhadap minat anak,
- b. Asesmen formatif yang holistik dan reflektif,
- c. Dokumentasi pembelajaran sebagai “memori organisasional”, dan
- d. Kepemimpinan transformasional yang menghargai proses belajar guru dan anak.

Deep learning bukan hanya cara mengajar melainkan etika pengelolaan yang menggantikan logika birokrasi dengan logika pembelajaran berkelanjutan. (2) Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis hermeneutik Van Manen, (2023) untuk menangkap makna subjektif dari “merdeka belajar” dalam konteks budaya Bali. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana kebijakan nasional diinternalisasi, diinterpretasi ulang, dan

dikontekstualisasi oleh pelaksana bukan sebagai penerapan teknis, melainkan sebagai rekonstruksi identitas pedagogis yang berlangsung melalui refleksi kolektif, coba-gagal, dan dialog dalam Komunitas Belajar (Kombel). Melalui triangulasi wawancara, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, penelitian ini berhasil menangkap dinamika mikro tata kelola yang tidak terlihat dalam studi evaluatif atau kuantitatif. (3) Secara praktis, penelitian ini menghasilkan model tata kelola PAUD yang berkelanjutan, yang dibangun di atas tiga pilar:

- a. Kombel sebagai *governing community* ruang pengambilan keputusan kolektif yang menggantikan hierarki birokratis,
- b. Kepemimpinan transformasional yang distributif yang mengembalikan otoritas pedagogis kepada guru, dan
- c. Integrasi nilai lokal (Tri Hita Karana dan gotong royong) sebagai fondasi budaya yang mempersatukan kebijakan nasional dengan realitas lokal.

Keunikan model ini terletak pada kemampuannya membangun resiliensi institusional. Hal ini terwujud melalui pelatihan mandiri oleh guru senior, dokumentasi digital sebagai arsip hidup, dan budaya refleksi yang terus-menerus. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan Kurikulum Merdeka diukur bukan dari kepatuhan terhadap panduan teknis, melainkan dari kemampuan satuan membangun ekosistem pembelajaran yang hidup, kolaboratif, dan berakar pada identitas lokal.

Pada tataran filosofis, penelitian ini juga merefleksikan posisi epistemologis yang jelas: pengetahuan tentang “merdeka belajar” tidak ditransfer dari atas, tetapi dibangun bersama dalam konteks sosial-budaya. Ontologinya mengakui realitas

pendidikan sebagai proses yang dinamis dan relasional bukan struktur statis. Dan aksiologinya menegaskan bahwa pendidikan bermakna ketika ia memuliakan anak, menghargai guru, dan menyatu dengan nilai-nilai luhur masyarakat.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini bukan terletak pada objek atau lokusnya, melainkan pada pemahaman baru tentang keberlanjutan: bahwa inovasi bisa bertahan bukan karena didorong dari luar, tetapi karena telah menjadi bagian dari identitas pedagogis dan tata kelola internal. Inilah kontribusi orisinal penelitian ini: menempatkan Kurikulum Merdeka bukan sebagai kebijakan yang diterapkan, melainkan sebagai proses yang dihayati dan dalam proses itu, satuan PAUD menjadi institusi yang benar-benar merdeka.

